

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan saat ini dilaksanakan ditaraf nasional maupun ditaraf daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh warga Negara Indonesia tertulis dalam UUD 1945 berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, oleh karena itu kemajuan yang dilakukan didaerah juga merupakan aspek kemajuan dalam skala nasional (Rustendi, 2018). Pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu untuk mempercepat pengembangan pembangunan dalam upaya untuk memaksimalkan kemampuan daerah yang dimiliki daerah secara optimal. Untuk memperbaiki kehidupan warga negaranya, pemerintah harus mengutamakan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, adil, keistimewaan, dan juga kekuasaan dan kemajemukan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan potensi lokal daerah, maka dibutuhkan biaya yang besar.

Kemakmuran masyarakat tergantung pada pemerintah daerahnya, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan objek-objek Pendapatan Asli Daerahnya, karena PAD merupakan suatu penunjang untuk mengukur pencapaian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diterima oleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan aturan yang berlaku dan digunakan kembali untuk keperluan daerahnya. Apabila PAD yang diterima

oleh suatu daerah besar, maka kemampuan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya akan tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa PEMDA telah mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Begitu juga sebaliknya, apabila PAD yang diterima oleh PEMDA kecil maka pelaksanaan otonomi daerah belum maksimal (Rustendi, 2018).

Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai ukuran melihat prospek suatu daerah dan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur hasil kerja pemerintah didalam melaksanakan kebijakan daerahnya. Besaran nilai dari PAD diharapkan mampu meminimalisir tingkat pendanaan pemerintah daerah terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat agar terciptanya otonomi daerah yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan rencana pembangunan suatu daerah dalam rangka mempercepat pembangunan dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki. Usaha peningkatan PAD yaitu dengan memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak dan iuran dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencari aliran pendapatan yang baru yang potensial. Pendapatan pajak daerah diharapkan dari periode ke periode harus mengalami kenaikan. Hal ini diharapkan supaya tidak adanya kesenjangan pembangunan antar daerah. Dengan begitu pembangunan antar daerah dapat berjalan seimbang.

Efektivitas pajak daerah adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh otoritas pajak daerah pada satu periode anggaran, untuk menilai apakah pemungutan pajak daerah tersebut sudah efektif atau tidak yang dapat diketahui dengan melihat persenan pendapatan pajak daerah yang sudah

teralisasi dibanding dengan sasaran yang sudah ditentukan (Nooraini & Yahya, 2018). Apabila jumlah pajak yang diterima sudah mencapai ataupun melebihi dari sasaran yang ditetapkan, maka dikatakan efektivitas pemungutan pajaknya telah tercapai, dan sebaliknya. Jika jumlah pajak yang diterima belum memenuhi target yang ditetapkan, maka dapat dikemukakan bahwa efektivitas penerimaan pajaknya belum maksimal. Efektivitas pajak daerah mengindikasikan kemampuan PEMDA dalam menghimpun pajak daerah sesuai dengan jumlah pendapatan pajak daerah yang sudah ditetapkan. Semakin efektif kinerja pemungutan pajak daerah, maka akan semakin membantu pemerintah daerah dalam mencapai realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Efektivitas merupakan sejauh mana keberhasilan dari suatu target yang sudah ditetapkan pada awalnya. Sementara itu, efektivitas pajak daerah merupakan jumlah yang taksir berdasarkan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Apabila persentase pajak daerah minimal 1 atau 100% maka pajak daerah dikatakan efektif, yang didapat dari perhitungan interpretasi numerik dengan menggunakan kriteria *tax effectiveness* (Yakub et al., 2022). Semakin tinggi rasio target yang dicapai, akan tinggi juga efektivitasnya. Dalam hal memperoleh target efektivitas yang telah ditetapkan, maka petugas pemungutan pajak daerah diharapkan mampu melakukan tugasnya secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020), efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang membayar pajak serta memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya.

Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauh keterlibatan daerah tersebut dalam mendukung PAD. Apabila kontribusi pajak daerah lancar, maka akan lancar juga pembangunan yang akan diterima oleh daerah tersebut. Kontribusi pajak daerah merupakan keterlibatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang bisa dilihat berdasarkan perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan total PAD pada suatu tahun anggaran (Nooraini & Yahya, 2018). Kontribusi pajak daerah turut serta dalam peningkatan PAD dan juga berperan penting dalam pembangunan daerah. Dikatakan berperan penting dikarenakan, jika kontribusi pajak daerah tinggi maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah. Dimana fungsi dari pajak daerah yang diterima oleh suatu daerah adalah untuk pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ini, kontribusi pajak daerah berjalan bersamaan dengan PAD atau dengan kata lain saling ketergantungan.

Semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah maka akan tinggi juga pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya. Apabila kontribusi pajak daerah rendah terhadap pendapatan asli daerah maka akan rendah juga pendapatan asli daerah tersebut. Dari hal tersebut, kontribusi pajak daerah diharapkan mampu secara maksimal membantu pendapatan asli daerahnya supaya sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan guna membantu pembangunan daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosa et al., 2020) kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup baik, dikarenakan adanya system mekanisme kontrol kontribusi daerah terhadap PAD.

Tabel 1. 1 Target beserta Realisasi Pajak Daerah

| No. | Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|-----|-------|----------------------|--------------------|------------|
| 1. | 2017 | 874.412.619.360,00 | 648.218.274.622,87 | 74.13% |
| 2. | 2018 | 970.977.686.467,00 | 845.697.306.042,89 | 87.10% |
| 3. | 2019 | 1.059.951.387.421,80 | 934.458.907.796,97 | 88.16% |
| 4. | 2020 | 1.225.272.547.554,19 | 755.879.588.525,35 | 61.69% |
| 5. | 2021 | 1.156.408.239.166,00 | 796.767.486.336,17 | 68.90% |

Sumber: <https://siependa.batam.go.id/>

Data diatas merupakan proyeksi pemungutan pajak daerah Kota Batam tahun 2017-2021. Dari data diatas, menunjukkan target yang sudah ditentukan, realisasinya belum terlaksana secara maksimal. Dari data tersebut menunjukkan bahwa target atau sasaran yang diharapkan atas pajak daerah pada setiap periodenya berubah-ubah, tetapi hal tersebut juga terjadi dengan realisasi yang terjadi, yang dimana terkadang mengalami penurunan. Pada tahun 2017, persentasi dari realisasi Pajak Daerah senilai 74.13%. pada tahun 2018, persentasi dari realisasi pajak daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebesar 87.10%. Pada tahun 2019, realisasi PAD mengalami kenaikan yaitu sebesar 88.16%. Realisasi pajak daerah secara persentase turun signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 61.69%. Dan pada tahun 2021, persentasinya kembali mengalami kenaikan sebesar 68.90%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja semaksimal mungkin supaya dapat memenuhi target yang sudah ditentukan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan juga uraian masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti mengambil judul tentang “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah

1. Selama tahun 2017-2021 target anggaran dari pendapatan asli daerah Kota Batam tidak tercapai
2. Pemungutan pajak daerah yang tidak efektif mengakibatkan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak, juga birokrasi yang terkesan terkadang membeli-belit dan juga masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pajak daerah terhadap kemajuan daerah.
3. Kontribusi pajak daerah belum maksimal sehingga realisasi dari Pendapatan Asli Daerah belum maksimal

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Periode dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017-2021
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah
4. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?
2. Bagaimanakah Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa Efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?
2. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara praktis maupun secara teoritis

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan untuk pengembangan pengetahuan, terkhususnya dibidang Pendapatan Asli Daerah

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, penelitian dibidang Pendapatan Asli Daerah.

1.6.2 Manfaat praktis

Dalam manfaat praktisnya, manfaat penelitian ini adalah

1. Penulis

Bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam

2. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil dari analisis ini akan memberikan sumber daya tambahan untuk penelitian selanjutnya di Universitas Putera Batam

3. Bagi pihak Pemerintah kota Batam

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk penilaian kinerja pemerintah, termasuk tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Batam sehingga pemerintah dapat memaksimalkan realisasi pajak daerah.